

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Keaslian Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Pajak Penghasilan	19
a. Subjek Pajak & Wajib Pajak	19
b. Objek Pajak Penghasilan.....	20
c. Pajak Penghasilan Pasal 26	20
B. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda/ <i>Tax Treaty</i>	21
a. Definisi , Tujuan & Manfaat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) 21	
b. Penerapan dan Hak Pemajakan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)	21
c. P3B Indonesia-Belanda	22
C. Penyelesaian Sengketa Pajak	22

a.	Proses Keberatan pada Tingkat Direktorat Jenderal Pajak	22
b.	Penyelesaian Sengketa Pajak pada Tingkat Pengadilan Pajak	23
c.	Penyelesaian Sengketa Pajak pada Tingkat Mahkamah Agung	24
D.	Special Purpose Vehicle/Special Purpose Entity/Conduit Company	24
E.	Beneficial Owner	31
F.	Tax Planning (Transfer Pricing, Thin Capitalization, Treaty Shopping, Controlled Foreign Corporation)	31
a.	Transfer Pricing	32
b.	Thin Capitalization	33
c.	Treaty Shopping	33
d.	Controlled Foreign Corporation	34
G.	Peraturan Penghindaran Pajak	34
a.	General Anti Avoidance Rules	34
b.	Specific Anti Avoidance Rules	35
METODE PENELITIAN		36
A.	Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian	36
a.	Jenis Penelitian	36
b.	Sifat Penelitian	37
B.	Jenis Data	38
C.	Cara dan Alat Pengumpulan Data	45
a.	Pengumpulan Data	45
b.	Alat Pengumpulan Data	45
D.	Teknis Pengolahan Data	45
a.	Sistematikasi	45
b.	Logis	46
E.	Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		47
A.	Konsep dan Pengaturan <i>Special Purpose Vehicle</i> dalam Hukum Perpajakan Indonesia	47

a. Pengertian, jenis-jenis dan fungsi <i>Special Purpose Vehicle</i> untuk Penghindaran Pajak	47
Shell company	61
b. Pengaturan <i>Special Purpose Vehicle</i> menurut Hukum Perpajakan Indonesia 63	
B. Implementasi penggunaan <i>Special Purpose Vehicle</i> menurut Fiskus, Pengadilan Pajak dan Mahkamah Agung dalam Putusan Peninjauan Kembali Nomor 768/B/PK/PJK/2012 dan Nomor 82/B/PK/PJK/2015	89
a. Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 768/B/PK/PJK/2012	89
Tingkat Keberatan dan Banding	89
b. Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 82/B/PK/PJK/2015	98
Tingkat Keberatan dan Banding	98
BAB V PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	120